RUU TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT REPUBLIK INDONESIA

AKD: RUU TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT REPUBLIK INDONESIA

Bulan: Maret 2022

Oleh: RUU TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR


# PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR tak dapat menolak usulan RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR dari anggota ataupun dari fraksi. Munculnya RUU itu dinilai bukan dadakan meski disoroti oleh publik.

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna di Kompleks Parlmen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). Rapat paripurna ini merupakan pembukaan masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021.

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022 dinilai bukan dadakan atau diselundupkan, tetapi sebelumnya sudah menjadi usulan sejumlah fraksi di DPR.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, Baleg DPR tidak dapat menolak usulan RUU tersebut dari anggota ataupun dari fraksi. ”Justru karena itu (RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban) usulan dan dianggap sesuatu hal yang urgen, maka Baleg tidak bisa menolak,” kata Supratman, Selasa (7/12/2021), di Jakarta.

Menurut Supratman, substansi RUU itu akan menegaskan kembali soal hak dan kewajiban DPR. Apa yang sudah ada di dalam UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3) akan ditegaskan serta didetailkan kembali dalam bentuk UU. Dengan demikian, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban DPR dalam melaksanakan tugas-tugas di parlemen.

”RUU itu diajukan karena ingin memberikan kepastian hak dan kewajiban anggota parlemen dalam melakukan tugasnya,” katanya.

Namun, RUU itu masih akan dilihat dan dikaji materinya. ”Jadi, kewajibannya juga harus dirinci ke depannya sehingga bisa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” ucap Supratman.

RUU itu diajukan karena ingin memberikan kepastian hak dan kewajiban anggota parlemen dalam melakukan tugasnya.

RUU itu sebelumnya dipertanyakan urgensinya karena hak dan kewajiban DPR telah banyak diatur dalam UU MD3. Selain itu, soal hak dan kewajiban DPR juga sudah diterapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan berbagai peraturan internal lainnya di DPR.

RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR sebelumnya masuk sebagai 40 RUU yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2022 bersama revisi UU Cipta Kerja dan perubahan kedua terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2020). Dalam aksi itu, para peserta unjuk rasa menyatakan mosi tidak percaya kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

Tak ada urgensi

Pelaksanaan hak dan kewajiban itu, kan, sudah diatur di dalam tatib, kode etik, dan UU MD3. Memasukkan peraturan tentang hak dan kewajiban DPR ke dalam UU itu kurang tepat. Sebaiknya itu cukup melalui peraturan internal saja, yakni peraturan DPR.

Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC), Muhammad Ichsan, mengatakan, sebenarnya tidak ada urgensi dalam penyusunan RUU tersebut. Seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban DPR cukup diatur dalam peraturan internal DPR dan tidak perlu dituangkan ke dalam UU.

”Pelaksanaan hak dan kewajiban itu, kan, sudah diatur di dalam tatib, kode etik, dan UU MD3. Memasukkan peraturan tentang hak dan kewajiban DPR ke dalam UU itu kurang tepat. Sebaiknya itu cukup melalui peraturan internal saja, yakni peraturan DPR,” katanya.

Kesannya, menurut Ichsan, RUU ini dipaksakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Padahal, dalam situasi saat

ini, publik memerlukan UU yang lebih mengatasi persoalan masyarakat dan peraturan mengenai internal DPR dinilai bukan sesuatu yang mendesak dilakukan.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (1/6/2021).

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menambahkan, masuknya RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR ini menunjukkan kebingungan DPR menentukan prioritas legislasi. Apalagi dengan kurang baiknya kinerja legislasi DPR dua tahun terakhir.

”Apa yang diatur dalam tatib dan UU MD3 saja belum diinternalisasi oleh DPR dan dieksekusi dengan baik, sekarang ada RUU ini. Sulit dibayangkan apa isi RUU itu karena semua sudah diatur dalam UU MD3 dan tatib DPR,” ujarnya.

Dengan mengusulkan RUU itu ke dalam Prolegnas Prioritas 2022, Lucius menilai DPR tidak mengevaluasi pengalaman kinerja legislasi yang buruk. Sebab, mereka malah memasukkan RUU yang tidak mendesak dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat. ”Kalau seperti ini, DPR menambah rumit jumlah UU yang ada dan obyek pengaturannya, di samping juga RUU yang tak perlu,” ucapnya.

Masih dikaji

Terkait skema revisi UU Cipta Kerja dan perubahan kedua UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Supratman menyatakan masih menunggu kajian dan komunikasi dengan pemerintah. Ada kemungkinan keduanya direvisi secara simultan atau perubahan dengan menyusun ulang UU Cipta Kerja dari awal.

| JENIS | KETERANGAN | URL |
|---|---|---|
| Berita | DPR: HAK IMUNITAS LINDUNGI TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI WAKIL RAKYAT | https://www.mkri.id/index.php?\npage=web.Berita&id=14422 |
| Berita | INTERUPSI TAK DIHIRAUKAN, PUAN DIINGATKAN UNTUK HARGAI HAK ANGGOTA DPR | https://nasional.kompas.com/re\nad/2021/11/08/15260361/interup\nsi-pks-tak-dihiraukan-puan-dii\nngatkan-untuk-hargai-hak-anggo\nta-dpr?page=all |
| Berita | INTERUPSI TAK DIHIRAUKAN, PUAN DIINGATKAN UNTUK HARGAI HAK ANGGOTA DPR | https://nasional.kompas.com/re\nad/2021/11/08/15260361/interup\nsi-pks-tak-dihiraukan-puan-dii\nngatkan-untuk-hargai-hak-anggo\nta-dpr?page=all |
| Berita | LEGISLASI : TAK MENDESAK RUU HAK DAN KEWAJIBAN DPR | https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/13707 |
| Berita | MASUK PROLEGNAS 2022, MATERI RUU PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DPR BELUM JELAS | https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/13708 |
| Berita | TIDAK URGEN, RUU HAK DAN KEWAJIBAN DPR | http://kliping.dpr.go.id/ |
| Jurnal | IMPLIKASI PERLUASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW | https://ojs.unud.ac.id/index.p\nhp/Kerthanegara/article/view/4\n2281?articlesBySameAuthorPage=\n2 |
| Buku | ADVOKASI SEBAGAI KEWAJIBAN DPR RI DALAM MENGARTIKULASIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT LEMAH (ANALISIS TERHADAP FUNGSI DAN HAK KONSTITUSIONAL DPR RI) | https://onesearch.id/Record/IO\nS1.INLIS000000000205782 |
| Undang-undang & Peraturan | Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah | http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200727-1\n01339-7902.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah | http://berkas.dpr.go.id/armus/\nfile/Lampiran/leg_1-20200729-0\n83912-7920.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah | https://dpr.go.id/dokjdih/docu\nment/uu/UU_2014_17.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH | https://www.dpr.go.id/dokjdih/\ndocument/uu/1789.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2TAHVN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2OO4 TENTANG JALAN | https://www.dpr.go.id/dokjdih/\ndocument/uu/1790.pdf |